

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiq, Bachrul, 2013, *Hukum Lingkungan: Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, Penerbit Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Setara Press, Malang.
- \_\_\_\_\_, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' dan Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Azis, Asmaeny dan Izlindawati, 2018, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Abdul Mukhtie Fadjar, 2018, *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum: Sejarah dan Pergeseran Paradigma*, Intrans Publishing, Malang.
- Fabri, M. & P. M. Langbroek, 2000, *Good Judges Are Not Born But Made*, *Rendre Et Gérer la Justice Au 21e Siècle*, 14.
- Hoesein, Zainal Arifin, 2016, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*, Setara Press, Malang.
- Lubis, Suhrawardi K., 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustofa, Wildan Suyuthi, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Palguna, I Dewa Gede, 2008, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State: Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2018, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Konstitusi Press, Jakarta.



- Panjaitan, Marojahan J.S., 2018, *Membangun Badan Peradilan yang Beradab, Berbudaya, dan Berkeadilan Menurut Teori, Praktik, dan UUD 1945*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Rimdan, 2012, *Kekakuasaan Kehakiman Pasca-Amendemen Konstitusi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sadono, Bambang, 2019, *Penataan Sistem Ketatanegaraan*, Badan Pengkajian MPR RI, Jakarta.
- Satriawan, Iwan, Septi Nur Wijayanti, dan Beni Hidayat, 2019, *Penataan Seleksi dan Pengawasan Hakim Konstitusi: Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan*, UMY Press, Yogyakarta.
- Sengupta, Arghya, 2019, *Independence and Accountability of the Higher Indian Judiciary*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Suadi, Amran, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sulaiman, King Faisal, 2017, *Politik Hukum Indonesia*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.
- Supriadi, 2010, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Sumadi, Ahmad Fadlil, 2013, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan: Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang.
- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi: Aktualisasi dalam Praksis Kenegaraan*, Setara Press, Malang.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Syahrizal, Ahmad, 2006, *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Yusa, I Gede, 2016, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Press, Malang.



### Artikel Jurnal

- Aulia, Eza, “Sistem Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi dalam Mewujudkan Independensi Hakim”, *Jurnal Public Policy*, Vol. 2, No. 1, Oktober 2018.
- Chaidir, Ellydar dan Suparto, “Perlunya Pengawasan terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam Rangka Menjaga Martabat dan Kehormatannya”, *UIR Law Review*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2017.
- Daming, Saharuddin, “Peluang dan Tantangan Perwujudan Sistem Peradilan yang Bersih dan Berkualitas”, *Yustisi*, Vol. 3, No. 2, September 2016.
- Fahmiron, “Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman”, *Litigasi*, Vol. 17, No. 2, 2016.
- Friedman, Lawrence M., “The Concept of the Self in Legal Culture”, *Cleveland State Law Review*, Vol. 38, Issue 4, 2017.
- Fitri, Rahma, “Pelanggaran Etik dan Hak Pribadi dalam Kasus Kode Etik di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Rechtsvinding*, Maret 2018.
- Hakim, Muh. Ridha, “Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 2, Juli 2018.
- Harijanti, Susi Dwi, “Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4, Vol. 21, Oktober 2014.
- Hendrawati, Heni, Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, Muhammad Cahyo Yudhanto, dan Nico Sunarko Putra, “Aspek Penegakan Kode Etik Hakim dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Bermartabat dan Berintegritas”, *Varia Justicia*, Vol. 12, No. 1, Maret 2016.
- Indramayu, Jayus, dan Rosita Indrayati, “Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi yang Berkualifikasi”, *e-Journal Lentera Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Mardika dan Cindy Dalli Puspitomanik, “Kepastian Pengaturan Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi sebagai Upaya Pengawasan Preventif”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, April 2020.
- Mardiya, Nuzul Qur’aini, “Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Etik”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 1, 2017.



- Purwaningsih, Endang “Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya”, *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 1, Februari 2015.
- Simanjuntak, Arif Sharon, “Kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Rangka Penegakan Konstitusi di Indonesia”, *Pandecta*, Vol. 10, No. 2, Desember 2015.
- Simanjuntak, Gracia Margaretha dan Suatra Putrawan, “Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal Asing”, *Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 06, Oktober 2014.
- Sorik, Sutan, Mirza Nasution, dan Nazaruddin Nazaruddin, “Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3, November 2018.
- Tutik, Titik Triwulan, “Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, Mei 2012.
- Wijayanti, Winda, Nuzul Quraini M., Siswantana Putri R., “Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, Desember 2015.
- Winata, Muhammad Reza, “Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Perspektif Independensi dan Akuntabilitas Peradilan”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2014.
- Wiryanto, “Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4, Desember 2016.

### **Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

- Handayani, Irma, “Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 01/MKMK-SPP/II/2017)”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Nurhawa, Tia, “Kewenangan Dewan Etik dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Kode Etik Hakim Konstitusi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2018.



Satriawan, Iwan, “Role of The Constitutional Court in Consolidating Democracy in Indonesia”, *Tesis Doktor*, Ahmad Ibrahim Kuliyyah of Laws, International Islamic University Malaysia, 2017.

Siallagan, Herman, “Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik dan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi”, *Skripsi*, Universitas Bengkulu, 2018.

Wantu, Fence M., Novendri M. Nggilu, Suwitno Y. Imran, Rahmat Teguh Santoso Gobel, dan Supriyadi A. Arief, “Studi Efektivitas Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi RI”, *Laporan Penelitian*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2017.

#### **Artikel dalam Antologi dengan Editor**

Fadjar, Abdul Mukthie, “Kode Etik bagi Pejabat Publik: Antara Idealisme dan Pragmatisme”, dalam Imran dan Festy Rahma Hidayati, 2017, *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

Sumartoyo, “Budaya Hukum dan Kekerasan di Peradilan”, dalam Imran dan Festy Rahma Hidayati, 2017, *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

Wajdi, Farid, “Urgensi Etika dalam Peradilan”, dalam Imran dan Festy Rahma Hidayati, 2017, *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

#### **Internet**

Anti-Corruption Clearing House, “Jejak Kasus: Akil Mochtar”, <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/29-akil-mochtar>, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.

Anti-Corruption Clearing House, “Jejak Kasus: Imas Dianasari”, <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/109-imas-dianasari>, diakses pada tanggal 8 Juni 2020.

Anti-Corruption Clearing House, “Jejak Kasus: Janner Purba”, <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/377-janner-purba>, diakses pada tanggal 8 Juni 2020.



Anti-Corruption Clearing House, “Jejak Kasus: Ramlan Comel”,  
<https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/305-ramlan-comel>, diakses pada  
tanggal 8 Juni 2020.

Courts and Tribunals Judiciary, “Guide to Judicial Conduct”,  
<https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2018/03/Amended-Guide-to-Judicial-Conduct-revision-Final-v002.-March-2020-pdf.pdf>, diakses pada  
tanggal 13 Juli 2020.

Indonesia Corruption Watch, “Catatan ICW: MK di Era Arief Mulai Tidak Pro  
Pemberantasan Korupsi”, [https://antikorupsi.org/id/news/catatan-icw-mk-  
di-era-arief-mulai-tidak-pro-pemberantasan-korupsi](https://antikorupsi.org/id/news/catatan-icw-mk-di-era-arief-mulai-tidak-pro-pemberantasan-korupsi), diakses pada tanggal  
4 Juni 2020.

International Commission of Jurists, “*The Rule of Law in a Free Society*”,  
[https://www.icj.org/wp-content/uploads/1959/01/Rule-of-law-in-a-free-  
society-conference-report-1959-eng.pdf](https://www.icj.org/wp-content/uploads/1959/01/Rule-of-law-in-a-free-society-conference-report-1959-eng.pdf), diakses pada tanggal 3 Maret  
2020.

Korea Legislation Research Institute, “Constitutional Court Act”,  
[http://elaw.klri.re.kr/eng\\_service/lawView.do?hseq=47509&danlang=ENG](http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=47509&danlang=ENG),  
diakses pada tanggal 8 Juni 2020.

Kuwado, Fabian Januarius, "Terlibat Kasus-kasus Etik, Arief Hidayat Diminta  
Mundur dari Ketua MK",  
[https://nasional.kompas.com/read/2018/01/25/20110941/terlibat-kasus-  
kasus-etik-arief-hidayat-diminta-mundur-dari-ketua-mk](https://nasional.kompas.com/read/2018/01/25/20110941/terlibat-kasus-kasus-etik-arief-hidayat-diminta-mundur-dari-ketua-mk), diakses pada  
tanggal 2 Januari 2020.

Mahkamah Agung, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”,  
[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/be452a1eb1d41  
e80a0f2af6ee047491b.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/be452a1eb1d41e80a0f2af6ee047491b.html), diakses pada tanggal 8 Juni 2020.

Mahkamah Konstitusi, “Keputusan Dewan Etik”,  
<https://mkri.id/index.php?page=web.PutusanEtik&pages=1&danmenu=2>,  
diakses pada tanggal 7 Juni 2020.

Mahkamah Konstitusi, “Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI”,  
<https://mkri.id/index.php?page=web.Beritadanid=11767>, diakses pada  
tanggal 11 Maret 2020.

Rahadian, Taufik dan Indra Subagja, “Beda Arief Hidayat dengan Arsyad Sanusi  
soal Mundur karena Etik MK”,  
[https://kumparan.com/kumparannews/beda-arief-hidayat-dengan-arsyad-  
sanusi-soal-mundur-karena-etik-mk/full](https://kumparan.com/kumparannews/beda-arief-hidayat-dengan-arsyad-sanusi-soal-mundur-karena-etik-mk/full), diakses pada tanggal 11 Juli 2020.



Ridhoi, M. Ahsan , “Pelantikan Arief Hidayat Wujud Penurunan Kualitas Hakim MK”, <https://tirto.id/pelantikan-arief-hidayat-wujud-penurunan-kualitas-hakim-mk-cGQo>, diakses pada tanggal 28 Mei 2020.

Sahbani, Agus, “Terbukti Terima Suap, Patrialis Divonis 8 Tahun Penjara”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59ad21b67bf6a/terbukti-terima-suap--patrialis-divonis-8-tahun-penjara/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020.

United Nations Office on Drugs and Crime, “*The Bangalore Principles of Judicial Conduct* 2002”, [https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial\\_group/Bangalore\\_principles.pdf](https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf), diakses pada tanggal 13 Januari 2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

### **Putusan MK**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Keputusan MKMK**

Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013.

Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK-SPP/II/2017.

Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK-SPL/II/2017.

### **Berita Acara Dewan Etik**

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 13/Info-III/BAP/DE/2016.

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 16/Info-IV/BAP/DE/2017.

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 18/Lap-V/BAP/DE/2018.



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**Pengaturan dan Penegakan Hukum Pembatasan Perilaku Hakim Konstitusi di Indonesia**  
RAIHAN AZZAHRA, Joko Setiono, S.H., M.Hum.  
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

## **Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang**

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi,  
Kementerian Hukum dan HAM, 2016.